

Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah

Maryati¹, Nir Setyo Wahdi¹, Aprih Santoso^{2,*}

¹Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
Jalan Soekarno Hatta Tlogosari, 50196, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
Jalan Soekarno Hatta Tlogosari, 50196, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ¹maryati@gmail.com, ²Nisetyo_wahdi@usm.ac.id, ^{3,*}aprihsantoso@sm.ac.id

Email Penulis Korespondensi: aprihsantoso@usm.ac.id

Submitted: 14/06/2022; Accepted: 25/06/2022; Published: 30/06/2022

Abstrak—Permasalahan penelitian ini adalah masih adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu atas faaktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Daerah terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan sampel sebanyak 175 laporan dari APBD Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu metode pengambilan sampel dengan menjadikan seluruh partisipasi menjadi sampel. Variabel yang digunakan adalah pendapatan daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan daerah sebagai variabel bebas, sedangkan belanja modal sebagai variabel terikat. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan variabel pendapatan asli daerah (PAD) dari belanja modal, akan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan luas daerah tidak berhubungan dengan alokasi anggaran belanja modal.

Kata Kunci: Daba; PAD; DAK; DAU; Wilayah

Abstract—This study to analyze and analyze the original Regional Funds, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, and Area Size for Capital Expenditures in cities / districts in Central Java in 2017-2021. The data used are secondary data using a sample of 175 reports from APBD of Cities / regencies throughout Central Java in 2017-2021. This Study uses a census method, namely sampling method by making all participation into a sample. The variables used are regional income (PAD), general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK), and area as independent variables, while capital expenditure as the dependent variable. Data analysis was performed by multiple linear regression analysis using the SPSS 26 program. The results of the study show variable local revenue (PAD) of capital expenditure, will the general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK) and a broad area is not related to the capital expenditure budget allocation.

Keywords: Funds; PAD; DAK; DAU; Area

1. PENDAHULUAN

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keterkaitan antara Pemda dan DPRD yang memiliki hubungan keagenan akan membentuk Peraturan Daerah yang di dalamnya terdapat pihak eksekutif sebagai pembuat rancangan APBD dan pihak legislatif yang menjadi penetap peraturan tersebut.

Dalam era desentralisasi fiskal, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di sektor publik. Dengan adanya peningkatan dalam layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Namun desentralisasi fiskal memiliki dua sisi penilaian, disatu sisi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola suatu daerah. Akan tetapi, desentralisasi fiskal juga menimbulkan masalah baru, hal ini dipicu oleh tingkat kesiapan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda (Permatasari & Mildawati, 2016). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan jumlah PAD yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintahan pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Dalil et al (2020); Azhar & Hermanto (2017); Jemparut & Riduwan (2017); Pratiwi (2019); Rohmah & Riharjo (2019) menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Pradita (2013); Mentayani & Rusmanto (2013); Tolu et al (2016) menyatakan PAD justru tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal

Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang berasal dari pemerintahan pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya dana tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Penelitian yang dilakukan diantaranya Aditya & Dirgantari (2017), Syukri & Hinaya (2019) yang menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan 2021; Jemparut & Riduwan (2017), Azhar & Hermanto (2017), Aditya & Maryono (2018); Rohmah & Riharjo (2019); 2 Dalil et al (2020) yang justru mengatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Tolu et al (2016); Syukri & Hinaya (2019); Wibisono & Wildaniati (2016) bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Azhar & Hermanto (2017); Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et al (2020) yang justru mengatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Hasil penelitian Rohmah & Riharjo (2019) bahwa luas wilayah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal, Namun, hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan Dalil et al (2020), bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini berbeda hasil dari penelitian sebelumnya karena peneliti menggabungkan beberapa variabel bebas dari peneliti-peneliti terdahulu dan adanya permasalahan tentang penelitian terdahulu yang inkonsistensi atas faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal tersebut. Penelitian ini masih sangat relevan dengan perkembangan bidang akuntansi public sekarang ini. Tujuan penelitian adalah ini menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Daerah untuk Belanja Modal di kota/kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2017-2021.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Teori PAD dari Permatasari & Midawati (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Kemampuan daerah dalam menyediakan sumber pendapatan daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan otonomi. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan pertimbangan PAD yang diterima. Dalil et al (2020); Azhar & Hermanto (2017); Jemparut & Riduwan (2017); Pratiwi (2019); Rohmah & Riharjo (2019) menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana primbangan keuangan (DAU) untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal. Orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil effort-nya sendiri dibanding dengan pendapatan yang diberikan oleh pihak lain seperti grant atau transfer. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan DAU. Jadi semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hasil penelitian Jemparut & Riduwan (2017); Azhar & Hermanto (2017); Aditya & Maryono (2018); Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et al (2020) yang justru mengatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Azhar & Hermanto (2017); Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et al (2020) mengatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang wilayahnya tidak begitu luas. Hasil penelitian Rohmah & Riharjo (2019) bahwa luas wilayah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal, Namun, hasil penelitian Ginting (2017); Dalil et al (2020), bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. H4 : Luas Wilayah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen dan penelitian ini didasarkan pada teori-teori, bahwa :

1. Variabel Independen

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Permatasari & Midawati, 2016).
- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pradita, 2013).
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “block grant”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.
- Luas Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistmenya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

2. Variabel Dependen

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

2.2 Objek Penelitian,

Objek penelitiannya adalah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Unit sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada kabupaten/kota se Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2017-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus.

2.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2017-2021 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Luas wilayah diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui situs website www.depdagri.go.id. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan.

2.4 Metode Analisis

Penelitian korelasional ini memiliki tujuan menguji seberapa jauh variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain (Nurhasanah & Vikaliana, 2021). Hasil pengumpulan data dari isian kuesioner diolah melalui bantuan program software SPSS 26.

2.5 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti, mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hal ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

2.6 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi terhadap data.

2.7 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya telah berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian untuk mendeteksi normalitas data dapat dilihat melalui normal probably plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jika hanya melihat grafik histogram hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot (Ghozali, 2018). Uji statistik dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan hasil perhitungan Zskewness dan Zkurtosis. Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal dan jika nilai signifikansi 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018).

2.8 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan Uji Glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

2.9 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi ini dilakukan uji Durbin Watson (DW). Setelah dilakukan regresi, kemudian dihitung DW-nya. Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel tertentu diperoleh nilai kritis dl (batas bawah) dan du (batas atas) dalam tabel daftar distribusi DW dengan berbagai nilai α .

2.10 Metode Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + \beta_4 \text{LUAS} + e \quad (1)$$

Dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = konstanta

β = intersep/slope/koeffisien regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

LUAS = Luas Wilayah

e = error

2.11 Pengujian Hipotesis

Secara statistik, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan nilai statistik t , nilai statistik F , serta koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2018).

2.12 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau ketertarikan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

2.13 Uji Statistik F

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas bisa dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018)

2.14 Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Statistik Deskriptif

Alokasi Anggaran belanja modal, PAD, DAU dan DAK menggunakan satuan dalam jutaan rupiah dimana berdasarkan laporan realisasi anggaran yang ada akan mencerminkan sejauh mana kabupaten dan kota di Jawa Tengah dalam membiayai alokasi anggaran belanja modalnya. Berikut ini adalah tabel 1 tentang Statistik deskriptif dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK.

Tabel 1. Statistik deskriptif dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	175	10,994	17,917	12,65430	1,318961
Dana Alokasi Umum	175	11,021	14,908	13,30498	,799699
Dana Alokasi Khusus	175	6,782	21,564	14,37865	3,734668
Luas Wilayah	175	2,119	8,934	5,76332	1,867361
Belanja Modal	175	11,020	14,910	12,66404	,828450
Valid N (listwise)	175				

Tabel 1 menjelaskan tentang deskripsi dari masing-masing variabel penelitian dengan jumlah sampel data sebanyak 175 yang diperoleh dari data laporan realisasi APBD pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2017-2021. Dari tabel diatas, diperoleh hasil :

1. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 10,994 atau Rp 39.351.000 dan nilai maksimum 17,917 atau Rp 4.035.649.000 dengan nilai mean sebesar 12,65430 atau Rp 263.682.610. Standar deviasi dari PAD adalah 1,318961
2. DAU menunjukkan nilai minimum sebesar 11,021 atau Rp 83.588.000 dan nilai maksimum sebesar 46 14,908 atau Rp 1.613.162.000 dengan nilai mean sebesar 13,30498 atau Rp 731.483.810. Standar deviasi dari DAU sebesar 0,799699
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai minimum sebesar 6,782 atau Rp 7.126.000 dan nilai maksimum sebesar 21,564 atau Rp 259.641.000, nilai mean sebesar 14,37865 atau Rp 76.523.120 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,734668
4. Luas Wilayah diperoleh nilai minimum sebesar 2,119 atau 16 km² dengan nilai maksimum sebesar 8,934 atau 5782 km² , nilai mean sebesar 5,76332 atau 1.257,16 km² dan standar deviasi sebesar 1,867361 dimana standar deviasi ini menunjukkan banyaknya variance.
5. Belanja Modal diperoleh mean sebesar 12,65430 atau Rp 237.944.520. Jika dilihat dari nilai minimum variabel belanja modal sebesar 11,020 atau Rp 8.897.000 dan nilai maksimumnya 14,910 atau Rp 1.785.125.000, dengan standar deviasi sebesar 0,828450

3.2. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov pada residual persamaan dengan kriteria pengujian adalah jika probability value > 0,05 maka data terdistribusi normal. Berikut ini adalah tabel 2 tentang Uji Normalitas dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK.

Tabel 2. Uji Normalitas dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK.

Unstandardized Residual		
N		175
Normal Parameter S ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	11.71653293
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,074
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		000 ^c

Berdasarkan Tabel 2 bahwa data variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 atau 5% yang berarti data penelitian telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi dengan variabel dependen Belanja Modal (BM) melalui variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Luas Wilayah.

3.3. Uji Multikolinearitas

Berikut ini adalah tabel 3 tentang uji Multikolinearitas dari PAD, DAU dan DAK.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas dari PAD, DAU dan DAK

		C coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Error Std.	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	7,167	1,163		6,162	0	
	PAD	0,294	0,043	0,468	6,915	0	0,96 1,041

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
DAU	0,109	0,075	0,105	1,449	0,149	0,833	1,201
DAK	-0,011	0,015	-0,05	0,727	0,468	0,935	1,07
Luas Wilayah	0,084	0,033	0,189	2,56	0,011	0,811	1,234

Tabel 3. dapat dijelaskan bahwa dalam model persamaan pertama menunjukkan nilai VIF (*variance inflation factor*) dibawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10. Hasil perhitungan nilai *tolerance* variabel Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan luas wilayah menunjukkan hasil lebih dari 0,10 yaitu 0,96 ;0,833; 0,935 dan 0,811, tidak ditemukannya variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,041; 1,201; 1,07 dan 1,234 dengan begitu tidak ditemukannya variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10 , sehingga dapat dijelaskan menurut pengujian model regresi terbebas dari masalah multikolinieritas menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas.

3.4. Uji Autokorelasi

Berikut ini adalah tabel 4 tentang uji Autokorelasi dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.

Tabel 4. Uji Autokorelasi dari belanja modal, PAD, DAU dan DAK

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,502 ^a	,252	,234	,724914	1,901

Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa nilai DW sebesar 1,901 dengan k'=4 dan N=175 dengan nilai Du yaitu sebesar 1,7996 dan nilai DW lebih kecil dari 4-Du dan nilai 4-Du adalah 4-1,7996= 2,2004 sehingga didapatkan hasil 1,7996<1,901<2,2004 maka, pengaruh PAD, DAU, DAK, luas wilayah terhadap belanja modal tidak terjadi masalah autokorelasi dan dapat dilakukan pada pengujian selanjutnya.

3.5. Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini adalah tabel 5 tentang uji Heteroskedastisitas dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,028	0,711			1,446	0,15
	PAD	0,07	0,026	0,181		2,702	0,008
	DAU	-0,052	0,046	-0,082		-1,135	0,258
	DAK	-0,005	0,009	-0,04		-0,587	0,558
	Luas Wilayah	-0,111	0,02	-0,407		-5,578	0

Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa probability value (Sig) PAD sebesar 0,008, DAU sebesar 0,258, DAK sebesar 0,558 dan luas wilayah sebesar 0. Hasil uji tersebut mengindikasikan bahwa dalam regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6. Regresi Linier Berganda

Berikut ini adalah tabel 6 tentang Regresi Linier Berganda dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.

Tabel 6. Regresi Linier Berganda dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7,167	1,163			6,162	,000
	PAD	,294	,043	,468		6,915	,000
	DAU	,109	,075	,105		1,449	,149
	DAK	-,011	,015	-,050		-,727	,468
	Luas Wilayah	,084	,033	,189		2,560	,011

Tabel 6 hasil analisis regresi berganda di atas, nilai unstandardized coefficients dapat disusun model persamaan linier berganda yang menunjukkan pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dari perhitungan regresi linier berganda tersebut maka hasilnya:

$$\text{Belanja Modal} = 7,167 + 0,294\text{PAD} + 0,109\text{DAU} + -0,011\text{DAK} + 0,084\text{LUAS} + e$$

Dapat dijelaskan masing-masing koefisien variabelnya :

1. Koefisien PAD sebesar 0,294 menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja modal, berarti setiap terjadi kenaikan PAD, maka belanja modal cenderung mengalami kenaikan.
2. Koefisien DAU sebesar 0,109 menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja modal, yang berarti bahwa setiap kenaikan DAU, maka belanja modal cenderung mengalami peningkatan.
3. Koefisien DAK sebesar -0,011 menunjukkan pengaruh negatif terhadap belanja modal, yang berarti bahwa setiap kenaikan DAK, maka belanja modal cenderung mengalami penurunan.
4. Koefisien LW sebesar 0,084 menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja modal, yang berarti bahwa setiap kenaikan LW, maka belanja modal cenderung mengalami peningkatan.

3.7. Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Berikut ini adalah tabel 7 tentang Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,502 ^a	,252	,234	,724914	1,901

Tabel 7 hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,234. Hal ini berarti besar variasi variabel belanja modal pada kota/kabupaten se-Jawa Tengah yang dapat diterangkan oleh variasi variabel PAD, DAU, DAK dan luas wilayah adalah sebesar 23,4 % sedang sisanya 76,6 % dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian.

3.7.2 Uji Signifikansi Layak Model (Uji Statistik F)

Berikut ini adalah tabel 8 tentang hasil Uji Statistik F ANOVA dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30,086	4	7,522	14,313	,000"
	Residual	89,335	170	,525		
	Total	119,421	174			

Tabel 8, PAD, DAU, DAK, Luas Wilayah sebesar 14,313 dengan sig. 0.000. nilai sig. yang didapat masih lebih kecil dari tingkat sig. α 0,05, sehingga menerima hipotesis yang menyatakan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen.

3.7.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Berikut ini adalah tabel 9 tentang Ringkasan Hasil Penelitian dari Belanja Modal, PAD, DAU dan DAK. Hasil uji signifikansi-t pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Ringkasan Hasil Penelitian

Hipotesis	Koefisien	Nilai P	Hasil	Kesimpulan
H1: PAD → BM	0,294	0,000	H1 Diterima	Berpengaruh positif dan signifikan
H2 : DAU → BM	0,109	0,149	H2 Ditolak	Tidak Berpengaruh
H3 : DAK → BM	-0,011	0,468	H3 Di tolak	Tidak Berpengaruh
H4 : Luas wilayah → BM	0,084	0,011	H4 ditolak	Tidak berpengaruh

Berdasarkan uji t maka dapat dianalisis, sebagai berikut :

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis PAD terhadap belanja modal sebesar 6,915 dengan menunjukkan nilai sig. 0.0,000 < sig. 0,05 maka PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian H1 diterima.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Hasil hipotesis DAU terhadap belanja modal sebesar 1,449 dengan menunjukkan nilai sig. 0,149 > sig. 0,05 maka DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian H2 ditolak.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Hasil hipotesis DAK terhadap belanja modal sebesar $-0,727$ dengan menunjukkan nilai sig. $0,468 > \text{sig. } 0,05$ maka DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian H3 ditolak.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Hasil hipotesis luas wilayah terhadap belanja modal sebesar $2,56$ dengan menunjukkan nilai sig. $0,011 > \text{sig. } 0,05$ maka luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian H4 ditolak.

3.8 Pembahasan**Pengaruh PAD Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal. Berpengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja modal disebabkan adanya asumsi bahwa semakin pemerintah memaksimalkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah akan semakin mudah untuk membiayai pengeluaran pemerintah melalui belanja modal untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan investasi modal sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan produktivitas masyarakat terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan hal ini, dengan meningkatnya PAD maka belanja modal juga akan meningkat. Hasil ini sesuai dengan; Dalil et al (2020), Azhar & Hermanto (2017); Jemparut & Riduwan (2017); Pratiwi (2019); Rohmah & Riharjo (2019) menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Pradita (2013), Mentayani & Rusmanto (2013); Tolu et al (2016) menyatakan PAD justru tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh DAU Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Tidak berpengaruhnya DAU terhadap alokasi belanja modal disebabkan oleh sifat dari DAU sebagai Block Grant, yang memungkinkan daerah menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU belum dialokasikan secara penuh untuk belanja modal, dan baru dijalankan untuk membiayai belanja yang bersifat rutin, seperti : belanja pegawai, belanja barang ataupun lainnya, karena tujuan awal DAU sebagai pemerata keuangan antar daerah dan daerah yang potensi fiskalnya tinggi akan memperoleh DAU yang rendah begitu pula sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan Aditiya & Dirgantari (2017), Syukri & Hinaya (2019) yang menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Jemparut & Riduwan (2017), Azhar & Hermanto (2017); Aditya & Maryono (2018); Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et al (2020) yang justru mengatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal

Pengaruh DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukkan DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. DAK merupakan dana yang ditujukan khusus oleh pemerintah. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika memanfaatkan dana alokasi khusus dalam belanja modal, karena dana alokasi khusus pemanfaatannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sesuai dengan Tolu et al (2016), Syukri & Hinaya (2019); Wibisono & Wildaniati (2016) bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Azhar & Hermanto (2017); Rohmah & Riharjo (2019); Dalil et al (2020) yang justru mengatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal

Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Tidak berpengaruhnya luas wilayah terhadap alokasi anggaran belanja modal karena pengadaan belanja modal dari suatu pemerintah daerah harus melihat manfaat dan kebutuhan dari suatu daerah. Luas wilayah yang ada pada suatu daerah bukan menjadi pertimbangan dalam melakukan belanja modal. Daerah yang lebih luas belum tentu memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama dengan pertumbuhan daerah yang lebih kecil. Hasil penelitian ini sesuai dengan Rohmah & Riharjo (2019) bahwa luas wilayah tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun, Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Meianto et al (2014), Ginting (2017); Dalil et al (2020) bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

4. KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal. Berpengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja modal disebabkan adanya asumsi bahwa semakin pemerintah memaksimalkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah akan semakin mudah untuk membiayai pengeluaran pemerintah melalui belanja modal untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan investasi modal sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan produktivitas masyarakat terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah. DAU tidak berpengaruhnya DAU terhadap alokasi belanja modal disebabkan oleh sifat dari DAU sebagai Block Grant, yang memungkinkan daerah menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah. Hasil pengujian menunjukkan DAK tidak berpengaruh

terhadap alokasi anggaran belanja modal. DAK merupakan dana yang ditujukan khusus oleh pemerintah. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika memanfaatkan dana alokasi khusus dalam belanja modal, karena dana alokasi khusus pemanfaatannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Tidak berpengaruhnya luas wilayah terhadap alokasi anggaran belanja modal karena pengadaan belanja modal dari suatu pemerintah daerah harus melihat manfaat dan kebutuhan dari suatu daerah. nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,234. Hal ini berarti besar variasi variabel belanja modal pada kota/kabupaten se-Jawa Tengah yang dapat diterangkan oleh variasi variabel PAD, DAU, DAK dan luas wilayah adalah sebesar 23,4 % sedang sisanya 76,6 % dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian.

REFERENCES

- Aditiya, N, Y. & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompetemen*. XV(1): 42-56.
- Aditya, D, M, E. & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Prosiding SENDI. Universitas Stikubank Semarang*: 631-639.
- Azhar, A.A., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8). 1-15
- Dalail, A., Sukidin & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 14(1). 178-184
- Ginting, R. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *JOM Fekon*, 4(2). 4543-4557
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Jemparut, M. S., & Riduwan, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(9). 1-18
- Meianto, E., Betri, B., & Wenny, C.D. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 13 (3) 11-13.
- Mentayani, I., & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi*. 9(2): 91-102.
- Nurhasanah, S., & Vikaliana, R. (2021). *Statistika Sosial (1st ed.)*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Permatasari, I, & Mildawati, T, (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kotajawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(1), 1-17
- Pradita, R, R., 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Akuesa*, 1(2). 21-32
- Pratiwi, N.A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* . 3(2). 57-69
- Rohmah, N. & Riharjo, I.B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013 – 2017, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(6). 1-17
- Syukri & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA (Jurnal Of Economic, Management And Accounting)*. 2(2). 30-37
- Tolu, A., E, N. Walewangko, S. Y. I. Tumangkeng 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2): 540-549.
- Wibisono, N. & Wildaniati, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SILPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal, *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. 5(2). 14-25